

BAB III

EKSISTENSI POLITIK KAUM SARUNGAN DARI MASA KE MASA

Keterlibatan kaum sarungan (baca: kiai, santri dan masyarakat pesantren) dalam dunia politik sebenarnya bukanlah fenomena yang baru sama sekali. Meskipun kualitas dan kuantitasnya dalam setiap episode percaturan politik di Indonesia berbeda-beda, namun proses pewarnaan politik Indonesia tidak lepas dari keterlibatan kaum sarungan tersebut. Posisi seperti ini sesungguhnya sejalan dengan peta politik Indonesia. Menurut Deliar Noer, kekuatan politik Islam Indonesia selalu mengalami proses pasang surut. Ia pasang pada hampir setiap permulaan babak baru sejarah Indonesia, akan tetapi pada umumnya kemudian surut.

Secara umum, proses perjalanan politik bangsa ini dapat dibagi dalam empat bagian masa yaitu, *masa pra-kemerdekaan, masa awal kemerdekaan hingga berakhirnya Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Orde Reformasi*. Empat periodisasi tersebut selanjutnya penulis menggunakan untuk membaca dan menganalisa tentang pasang-surut dari kiprah kaum sarungan di dalam dunia politik. Dan itulah tema besar dari pembahasan dalam bab ini.

1. Politik Kaum Sarungan di Masa Pra Kemerdekaan

Sejak masa kolonialisme, Islam sudah memainkan peran yang sangat menentukan dalam berjuang menentang kolonialisme Belanda

dan menuntut kemerdekaan bangsa. Seperti dicatat oleh para pengkaji nasionalisme Indonesia, Islam berfungsi sebagai mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional guna menentang kolonialisme Belanda. "Agama Muhammad," tulis George McTurnan Kahin dalam karyanya, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, sebagaimana dikutip Bachtiar Effendi, bukan saja merupakan mata rantai yang mengikat tali persatuan; juga merupakan simbol kesamaan nasib (*in group*) untuk menentang penjajah asing dan penindas yang berasal dari agama lain.⁴¹ Sejarah mencatat bahwa Sarekat Islam (SI), yang didirikan pada tahun 1911, merupakan partai politik pertama yang didirikan di Indonesia. Bermula dari sebuah 'organisasi dagang', Serikat Dagang Islam (SDI), yang didirikan oleh H. Samanhoedi di Solo pada tahun 1911, SI kemudian berkembang pesat menjadi sebuah "organisasi politik" nasional pertama di Indonesia.

Memang, pada awalnya, pendirian SI berlatar-belakang adanya persaingan bisnis antara orang-orang pribumi Muslim dan golongan Cina.⁴² Akan tetapi, di dalam anggaran dasarnya dijelaskan bahwa perkumpulan ini berusaha memajukan perdagangan, memberikan pertolongan kepada anggota yang mengalami kesulitan, memajukan kepentingan jasmani dan rohani penduduk asli serta memajukan kehidupan agama Islam.⁴³ Jadi, sejak awal berdirinya, SI telah bersinggungan dengan dunia politik yang ada pada saat itu. Sosok politik SI semakin terlihat ketika ia berada di bawah kepemimpinan HOS Tjokroaminoto pada tahun 1912. Namun, sangat disayangkan bahwa posisi SI yang tengah menjulang dan memegang peranan penting dalam pergerakan nasional Indonesia itu kemudian tidak dapat dipertahankan lagi terutama di penghujung tahun 1920-an.

41 *Ibid.*, hlm. 62-63.

42 Takashi Shirasi, *Zaman Bergerak: Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terj. Hilmar Farid (Jakarta: Garfity, 1997), hlm. 47.

43 M. Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang-Surut*, (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 19.

Pada tahun-tahun berikutnya, idealisme dan aktivisme politiknya dibayang-bayangi oleh kelompok-kelompok sosial-politik lain yang tidak secara formal menyatakan Islam sebagai dasar ideologinya.

Merosotnya peran SI ini disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang paling penting adalah adanya ketidakmampuan para pemimpin dan aktivisnya untuk mengatasi berbagai perbedaan paham di antara mereka, khususnya yang berkaitan dengan persoalan arah politik SI terutama lagi setelah paham Marxisme dibawa masuk ke dalam organisasi ini.⁴⁴ Gagasan Marxisme tersebut dipelopori oleh kelompok minoritas beraliran kiri yang didasarkan pada kerja sama Eropa-Indonesia yang dikenal dengan partai *Indische Social Democratische Vereeniging* (ISDV; Asosiasi Demokrasi Sosial Hindia Belanda). Asosiasi tersebut didirikan oleh Hendrik Sneevlit pada tahun 1914. Kemudian, Pada tanggal 23 Mei 1920, ISDV diubah menjadi PKI (Partai Komunis Indonesia), dengan SI cabang Semarang sebagai pusatnya. Semaun dipilih sebagai ketuanya yang pertama, sekalipun pada waktu itu ia masih tetap sebagai anggota SI.⁴⁵

Diperkenalkannya paham Marxisme ke dalam organisasi SI memancing timbulnya konflik dan perpecahan di kalangan para pemimpin organisasi itu sendiri. Perpecahan di dalam tubuh SI yang mulai berlangsung pada pertengahan 1920-an, telah menjadikan SI kurang menarik bagi beberapa intelektual yang lebih muda dan terdidik secara Barat. Salah seorang di antaranya adalah Soekarno, anak didik Cokroaminoto, yang memutuskan untuk membentuk organisasi politik sendiri, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 dan mengembangkan paham ideologi politik yang berbeda. Tujuan PNI adalah menyempurnakan kemerdekaan Indonesia, baik ekonomi maupun politik, dengan pemerintahan yang dipilih oleh

44 Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia 1900-1942* (New York: Oxford University Press, 1978), hlm. 119-126.

45 Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985), hlm. 87.

dan bertanggung jawab kepada seluruh rakyat Indonesia. Menurut George Mc.T. Kahin seperti dikutip Bachtiar Effendi, didorong oleh gagasan mengenai persatuan seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai kemerdekaan, PNI ini kemudian mendasarkan kiprah nasionalisnya kepada paham ideologi kebangsaan (nasionalisme).

Meski seorang Muslim, Soekarno berkali-kali menegaskan bahwa partai tersebut tidak dapat mendasarkan diri kepada ideologi Islam. Baginya, ini merupakan pilihan yang terbaik, baik demi kemerdekaan maupun demi masa depan rakyat Indonesia yang Kristen maupun Muslim.⁴⁶ Sejak 1930-an dan selanjutnya, kelompok ini—bersama beberapa intelektual-aktivis didikan Barat lain yang baru kembali dari Belanda seperti Syahrir dan Mohammad Hatta—kemudian membentuk cikal-bakal gerakan nasionalis di Indonesia. Yang terjadi kemudian adalah, gerakan nasionalis ini, dalam kadar yang lebih besar dibandingkan ketika berhadapan dengan Marxisme sebelumnya, membangun panggung konfrontasi ideologis antara para pemimpin dan aktivis Islam politik dan pesaing-pesaing mereka yang berpaham nasionalis, terutama dalam soal hubungan antara agama (Islam) dan negara dalam sebuah negara Indonesia yang merdeka. Dalam konteks historis inilah dua kelompok yang saling bertentangan muncul dalam diskursus politik Indonesia, golongan Islam dan golongan nasionalis.⁴⁷

Ahmad Syafi'i Ma'arif membagi tiga bentuk ideologi politik dasar yang saling bersaing di panggung sejarah modern Indonesia, yakni Islam, Marxisme, dan Nasionalisme sekuler sekalipun sebagian besar tokoh dari kedua ideologi politik yang disebut terakhir masih beragama Islam, yaitu Islam sebagai agama pribadi dan bukan sebagai ideologi politik.⁴⁸ Dengan demikian, jelas bahwa Islam politik sejak pada masa

46 Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara*, hlm. 69-70.

47 *Ibid.*, hlm. 70.

48 Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 91.

pergerakan kemerdekaan telah memiliki varian-varian aliran pemikiran yang berbeda perjuangan ideologi politiknya. Tetapi pada prinsipnya masih berada dalam satu basis perjuangan untuk memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan RI dari kolonialisme.

Benturan antar ideologi-ideologi tersebut terus berlangsung hingga munculnya tokoh muda Muslim, misalnya, Mohammad Natsir yang berlatar belakang pendidikan Barat. Sehingga perseteruan ideologis antara nasionalisme dan Islam menjadi semakin keras dan sistematis. Bagi Natsir, faham nasionalisme harus mempunyai landasan teologis. Dengan kata lain, nasionalisme harus didasarkan kepada niat yang suci, ilahiah dan melampaui hal-hal yang bersifat material. Natsir kemudian memperkenalkan gagasan 'kebangsaan Islam'. Kemerdekaan, menurut Natsir, bukanlah tujuan akhir dari gerakan-gerakan nasionalis Islam. Sebaliknya, kemerdekaan harus dipandang tidak lebih dari 'tujuan antara' untuk mencapai ridha Allah. Hal ini harus dilakukan dengan cara menjadikan Islam sebagai hukum di tanah air ini. Sejalan dengan itu, ia menyatakan bahwa "orang Islam tidak akan berhenti hingga di situ (yakni kemerdekaan), melainkan akan melanjutkan perjuangannya, selama (negara) belum didasarkan dan diatur menurut susunan hukum kenegaraan Islam".⁴⁹

Di pihak lain, Soekarno mengklaim bahwa nasionalisme yang menjadikan orang-orang Indonesia "perkaknya Tuhan" dan membuat mereka hidup dalam roh.⁵⁰ Dan jika esai tulisan kontroversialnya Soekarno, "*Nasionalisme, Islam dan Marxisme*", dijadikan petunjuk, maka esai itu adalah sebuah obsesi untuk menyatukan apa yang ia (dan mungkin juga orang lain) lihat sebagai tiga aliran ideologis yang membentuk pandangannya untuk melihat nasionalisme dalam cara yang demikian lebar dan serba mencakup—suatu definisi yang oleh

49 Deliar Noer, *The Modernist Moeslim*, hlm. 260.

50 Bernham Dahm, *Sukarno and the Struggle for Indonesian Independence* (London: Cornell University Press, 1969), hlm. 176.

Soekarno sendiri digambarkan dengan istilah "luas seperti udara" yang memungkinkan setiap kecenderungan untuk membentuk aliansi yang sesuai dalam rangka mencapai kemerdekaan.⁵¹

Dari tulisan-tulisan awalnya mengenai Islam, kita bisa mengetahui bahwa Soekarno pada dasarnya mendukung pemisahan Islam dari negara.⁵² Tetapi ia tidak menyatakan bahwa sama sekali tidak ada hubungan apapun antara kedua aras religio-politik tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa Soekarno dengan tegas menentang pandangan mengenai hubungan formal-legal antara Islam dan negara, khususnya dalam sebuah negara yang tidak semua penduduknya beragama Islam. Baginya, model hubungan semacam itu hanya akan menimbulkan perasaan terdiskriminasi, khususnya di kalangan masyarakat non-Muslim di negara Indonesia ini. Meski demikian, sebagai seorang Muslim, Soekarno menganut faham hubungan yang bersifat substansialistik atau etis antara Islam dan negara. Bagi Soekarno, otentisitas sebuah "negara Islam" tidak pertama-tama ditunjukkan oleh penerimaan formal atau legal Islam sebagai dasar ideologi dan konstitusi negara, melainkan oleh perwujudan dan "api" serta "semangat" Islam itu sendiri dalam kebijakan-kebijakan negara.⁵³

Kedatangan pasukan Jepang di kepulauan Nusantara pada tahun 1942, nampaknya mengakhiri —untuk sementara waktu— polemik antara Soekarno dan Natsir. Tetapi persetujuan politik antara kedua kelompok di atas tetap berlangsung. Era pendudukan Jepang hanya berlangsung tiga tahun, dari Maret 1942 hingga Agustus 1945. Tidak seperti pemerintah kolonial Belanda, pemerintah Jepang mengaliansikan diri mereka dengan para pemimpin Islam dengan tujuan memenangkan perang. Selain itu, mereka tampak

51 Bachtiar Effendi, *Islam dan Negara*, hlm. 74.

52 Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi, Vol. 1* (Jakarta: Panitia Penerbitan Di bawah Bendera Revolusi, 1964), hlm. 369-500.

53 *Ibid.*, hlm. 452. Lihat juga dalam Bachtiar effendi, *Islam dan Negara*, hlm. 76.

lebih bersedia untuk memberi konsesi-konsesi terhadap tuntutan kelompok-kelompok Islam, bukan kelompok-kelompok nasionalis, apalagi kelompok aristokrat priyayi.

Konsesi-konsesi di atas mencakup: *Pertama*, pembentukan Kantor Urusan Agama (*Shumubu*). *Kedua*, pembentukan Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Dan *ketiga*, pembentukan Hizbullah, organisasi militer untuk para pemuda Muslim.⁵⁴ Pada tanggal 9 April 1945, BPUPKI dibentuk sebagai realisasi janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Anggotanya mula-mula 62, kemudian ditambah 6 lagi hingga berjumlah 68 orang. Menurut pengamatan Prawoto Mangkusasmito seperti dikutip oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif, dari 68 anggota tersebut, hanya 15 orang saja yang benar-benar mewakili aspirasi politik golongan Islam. Selebihnya yang sebagian besar dari kelompok nasionalis sekuler sudah tegas-tegas menolak Islam sebagai dasar negara. Masalah-masalah pokok yang dibicarakan dalam BPUPKI berkisar pada persoalan bentuk negara, batas negara, dasar filsafah negara dan hal-hal lain yang bertalian dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan tentang dasar negara dalam sidang BPUPKI berlangsung tegang dan panas.

Ada dua aliran politik yang muncul ke permukaan ketika itu; aliran politik Islam dan aliran pemisahan negara dan agama. Pada satu pihak, kelompok pendukung dasar Islam dalam BPUPKI ingin melaksanakan seluruh isi syari'ah yang telah tersedia tanpa suatu reformulasi tuntas dengan menghubungkannya pada ajaran etik al Qur'an sebagaimana yang dipahami dalam waktu sekarang ini. Formulasi sistematik ini diperlukan agar hukum-hukum Islam mampu menghadapi persoalan-persoalan modern yang dihadapi manusia. Di pihak lain, kelompok nasionalis sekuler tampaknya hanyalah ingin mengurung Islam dalam sebuah sangkar 'urusan pribadi' seorang

54 B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1977), hlm. 9.

Muslim. Debat tentang ini telah mewarnai perjalanan sejarah modern Indonesia, tapi sebuah penyelesaian mendasar belum lagi ditemukan: apakah dalam bentuk Islam Qur'ani atau sekularisme?⁵⁵ Isu tentang dasar negara telah memaksa para pendiri republik Indonesia untuk menjalani masa-masa yang sulit dalam sejarah modern Indonesia.

Tetapi akhirnya, sebuah kompromi politik dalam bentuk Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dapat dicapai. Menurut Muhammad Yamin seperti dikutip oleh A. Syafi'i Ma'arif, Piagam Jakarta itu sebenarnya adalah sebuah *Preamble* bagi konstitusi yang diajukan dalam sidang BPUPKI. Di dalamnya, Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati; tapi sila pertama, yaitu sila Ketuhanan diikuti oleh klausul: ... *dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.*⁵⁶

Keterbelakangan baik secara mental, maupun ekonomi yang dialami bangsa Indonesia, akibat penjajahan maupun akibat kungkungan tradisi, telah menggugah kesadaran kaum terpelajar untuk memperjuangkan martabat bangsa ini, melalui jalan pendidikan dan organisasi. Gerakan yang muncul pada tahun 1908 tersebut dikenal dengan sebutan "Kebangkitan Nasional". Semangat kebangkitan memang terus menyebar ke mana-mana setelah rakyat pribumi sadar terhadap penderitaan dan ketertinggalannya dengan bangsa lain. Sebagai jawabannya, muncullah berbagai organisasi pendidikan dan pembebasan.

Kalangan pesantren (baca: kaum sarungan) yang selama ini gigih melawan kolonialisme, merespon kebangkitan nasional tersebut dengan membentuk organisasi pergerakan, seperti *Nahdlatul Wathan* (Kebangkitan Tanah Air) pada 1916. Kemudian pada tahun 1918 didirikan *Taswirul Afkar* atau dikenal juga dengan "*Nahdlatul Fikri*"

55 Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 107.

56 *Ibid.*, hlm. 108.

(kebangkitan pemikiran), sebagai wahana pendidikan sosial politik dan keagamaan kaum santri. Dari situ kemudian didirikan *Nahdlatul Tujjar*, (pergerakan kaum saudagar). Serikat itu dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya *Nahdlatul Tujjar* itu, maka *Taswirul Afkar*, selain tampil sebagai kelompok studi juga menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cabang di beberapa kota.

Suatu waktu Raja Ibnu Saud hendak menerapkan asas tunggal yakni mazhab Wahabi di Mekkah, serta hendak menghancurkan semua peninggalan sejarah Islam maupun pra Islam, yang selama ini banyak diziarahi karena dianggap bid'ah. Gagasan kaum Wahabi tersebut kemudian mendapat sambutan hangat dari kaum modernis di Indonesia, baik kalangan Muhammadiyah di bawah pimpinan Ahmad Dahlan maupun PSII di bawah pimpinan HOS Tjokroaminoto. Sebaliknya, kalangan pesantren yang selama ini membela keberagaman, menolak pembatasan bermazhab dan penghancuran warisan peradaban tersebut.

Dengan sikapnya yang berbeda itu kalangan pesantren dikeluarkan dari anggota Kongres Al Islam di Yogyakarta pada tahun 1925. Akibatnya kalangan pesantren juga tidak dilibatkan sebagai delegasi dalam Mu'tamar 'Alam Islami (Kongres Islam Internasional) di Mekkah yang akan mengesahkan keputusan tersebut. Sumber lain menyebutkan bahwa K.H. Hasyim Asy'ari, K.H. Wahab Hasbullah dan sesepuh NU lainnya melakukan *walk out*.

Didorong oleh minatnya yang gigih untuk menciptakan kebebasan bermazhab serta peduli terhadap pelestarian warisan peradaban, maka kalangan pesantren terpaksa membuat delegasi sendiri yang dinamakan Komite Hejaz, yang diketuai oleh K.H. Wahab Hasbullah. Atas desakan kalangan pesantren yang terhimpun dalam Komite Hejaz, dan tantangan dari segala penjuru umat Islam di dunia, maka Raja Ibnu Saud mengurungkan niatnya. Hasilnya, hingga

saat ini di Mekkah bebas dilaksanakan ibadah sesuai dengan mazhab mereka masing-masing. Itulah peran internasional kalangan pesantren pertama, yang berhasil memperjuangkan kebebasan bermazhab dan berhasil menyelamatkan peninggalan sejarah dan peradaban yang sangat berharga.

Berangkat dari komite dan berbagai organisasi yang bersifat embrional dan ad hoc, maka setelah itu dirasa perlu untuk membentuk organisasi yang lebih mencakup dan lebih sistematis, untuk mengantisipasi perkembangan zaman. Maka setelah berkoordinasi dengan berbagai kiai, akhirnya muncul kesepakatan untuk membentuk organisasi yang bernama *Nahdlatul Ulama* (Kebangkitan Ulama) pada 16 Rajab 1344 H bertepatan dengan 31 Januari 1926 M. Organisasi ini dipimpin oleh K.H. Hasyim Asy'ari sebagai Rais Akbar.

Untuk menegaskan prinsip dasar organisasi ini, maka K.H. Hasyim Asy'ari merumuskan kitab *Qanun Asasi* (prinsip dasar), kemudian juga merumuskan kitab *I'tiqad Ahlussunnah Wal Jamaah*. Kedua kitab tersebut kemudian diejawantahkan dalam *khittah* NU, yang dijadikan sebagai dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan dan bahkan politik.

NU menganut paham Ahlussunah waljama'ah, sebuah pola pikir yang mengambil jalan tengah antara ekstrim *aqli* (rasionalis) dengan kaum ekstrim *naqli* (skripturalis). Karena itu sumber pemikiran bagi NU tidak hanya al-Qur'an, sunnah, tetapi juga menggunakan kemampuan akal ditambah dengan realitas empirik. Cara berpikir semacam itu dirujuk dari pemikir terdahulu seperti Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi dalam bidang teologi. Kemudian dalam bidang fikih mengikuti satu mazhab Syafi'i. Sementara dalam bidang tasawuf, mengembangkan metode Al-Ghazali dan Junaid Al-Baghdadi, yang mengintegrasikan antara tasawuf dengan syari'at.

Sejarah politik kaum sarungan NU pada masa-masa awal setidaknya menampilkan tiga sosok kiai yang sangat besar pengaruhnya dalam konteks politik bangsa maupun perjalanan organisasi NU itu sendiri. Ketiga kiai itu adalah KH M Hasyim Asy'ari, KH A Wahab Chasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Kiai Hasyim adalah sosok kiai yang mampu memberi makna pada politik yang kelihatannya bersifat duniawi dalam spirit teologis. Kiai Hasyimlah yang memelopori keluarnya fatwa bahwa negara Hindia Belanda adalah "wilayah Islam" dan status NKRI yang diproklamasikan Soekarno-Hatta adalah sah menurut pandangan Islam. Karena itu, mempertahankan kemerdekaan bukan saja bagian dari kewajiban masyarakat sebagai warga negara, tetapi juga kewajiban agama bagi para pemeluk Islam.

Kiai Wahab adalah kiai yang dikenal ahli diplomasi dan piawai melakukan manuver politik. Suatu hari, misalnya, Presiden Soekarno bertanya kepada Kiai Wahab: "Pak kiai, apakah nasionalisme itu ajaran Islam?" Kiai Wahab menjawab, "Nasionalisme ditambah *bismillah* itulah Islam. Kalau Islam dilaksanakan dengan benar, pasti umat Islam akan nasionalis." Begitulah Kiai Wahab, ulama yang sangat cerdas menerjemahkan ajaran Islam dalam kehidupan politik praktis. Sementara KH Bisri Syansuri adalah ahli fikih yang konsisten. Kalau Kiai Wahab dikenal sering menggunakan hukum yang lebih ringan, Kiai Bisri cenderung memilih hukum yang lebih berat. Menurut Kiai Bisri, pada dasarnya manusia itu suka menghindar dari hukum, karena itu lebih baik diterapkan hukum yang lebih berat. Dengan begitu, kalau seseorang melanggar, masih bisa ditampung oleh hukum yang lebih ringan. Karenanya, sikap politik Kiai Bisri cenderung keras dan tidak mengenal kompromi. Namun, Kiai Bisri juga tidak semata-mata mengedepankan hukum, ia juga selalu menjaga akhlak politik. Pada Muktamar Ke-24 NU di Bandung, Juli 1967, misalnya, Kiai Bisri berhasil mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan Rais 'Aam NU mengalahkan Kiai Wahab.

Tetapi Kiai Bisri menolak jabatan itu karena ia menghormati Kiai Wahab, teman sekaligus saudara iparnya sendiri. Mukhtar akhirnya memilih Kiai Wahab, tetapi kepemimpinan secara efektif dijalankan oleh Kiai Bisri. Itulah keteladanan politik kiai. Beberapa partai politik di Indonesia cenderung terus mengalami degradasi dan gagal membangun sistem internal yang kokoh. Karena itu gagal pula menjadi unsur penting yang menopang proses stabilisasi politik nasional. Hal itu bisa terjadi karena beberapa elite partai tidak mampu mengawinkan ketiga perspektif, yaitu teologis, akhlak dan fikih dalam berpolitik, bahkan sebagian lagi mengabaikan ketiga dimensi itu sehingga terseret dalam pusaran konflik yang berkepanjangan. Orientasi politiknya hanya kekuasaan jangka pendek, aturan main cenderung dilanggar, dan kesantunan politik diabaikan. Ini suatu praktik politik yang bertentangan dengan apa yang sudah dibangun oleh para kiai di masa lalu.

2. Politik Kaum Sarungan di Masa Kemerdekaan Hingga Berakhirnya Orde Lama (1945-1965)

Sepeninggal Jepang, Indonesia memasuki babak baru sejak diproklamasikannya kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945. Tetapi 'duri dalam daging' UUD 1945 masih tetap dirasakan sebagai sesuatu yang mengganggu sebagian anggota BPUPKI, terutama tentu saja mereka yang berasal dari kelompok agama minoritas. Duri tersebut tiada lain adalah anak kalimat: "...dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Setelah melewati saat-saat yang cukup kritis, maka pada tanggal 18 Agustus 1945, wakil-wakil umat Islam akhirnya menyetujui usul penghapusan anak kalimat tersebut dari Pancasila dan batang tubuh UUD 1945. Tetapi sila pertama, yaitu Sila Ketuhanan mendapat tambahan atribut yang sangat kunci, hingga menjadi: "*Ketuhanan Yang Maha Esa*". Modifikasi sila pertama ini dipandang sangat berarti, sebab dengan jalan demikian

wakil-wakil umat Islam tidak akan keberatan dengan formula baru Pancasila itu.⁵⁷

Proklamasi Kemerdekaan RI pada tahun 1945 telah memberikan kesempatan yang sama kepada berbagai aliran politik di Indonesia untuk dengan bebas membentuk partai-partai politik sebagai sarana demokrasi seperti yang dinyatakan oleh pasal 28 UUD 1945. Tidak ketinggalan adalah lahirnya partai politik Islam, yaitu Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia) yang berbeda dengan Masyumi buatan Jepang, karena ia dibentuk dan didirikan oleh umat sendiri tanpa campur tangan pihak luar, sekalipun nama lama tetap dipakai. Partai ini adalah partai gabungan yang didukung oleh Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Perikatan Umat Islam dan Persatuan Islam.⁵⁸ Tetapi seakan sudah menjadi Kultur lama bahwa Islam Indonesia pada umumnya terpecah menjadi dua kelompok, Islam tradisonalis dan modernis. Perpecahan ini telah berlangsung cukup lama dan lebih berhubungan dengan masalah perbedaan pemahaman atas Islam ketika berhadapan dengan kultur lokal daripada perbedaan ideologi politik.

Dalam hal ideologi politik, kedua kelompok tersebut sama-sama menginginkan Islam menjadi ideologi negara. Hal ini bisa dilihat dalam perdebatan konstituante, di mana kelompok tradisionalis dan modernis bersatu untuk memperjuangkan Islam melawan kelompok nasionalis. Tetapi pada saat yang sama, kedua kelompok itu pun saling bertarung dalam memperebutkan kursi kekuasaan. Konflik politik keduanya terlihat jelas ketika NU keluar dari Masyumi pada tahun 1952, yang penyebab langsungnya adalah "direbutnya" jabatan menteri agama yang sekian lama menjadi "milik" NU oleh Faksi modernis di Masyumi. Sebelum itu, PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia, yang

57 *Ibid.*, hlm. 109.

58 Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional* (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1987), hlm. 49-50.

dulunya bernama SI) juga telah keluar dari Masyumi pada tahun 1947.⁵⁹ Jadi, sebetulnya kelompok Islam memiliki ideologi politik yang sama, tetapi sebagai dua kelompok yang berbeda, mereka memiliki persaingan politik yang didasarkan atas kepentingan kelompok. Kesatuan ideologis inipun samar-samar masih terlihat ketika kedua kelompok tersebut berada dalam rumah partai yang sama, yakni PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Masih jelas dalam ingatan kita semua bahwa ketika pada Sidang Umum MPR tahun 1978, pemerintah mengusulkan indoktrinasi ideologi negara, Pancasila (menurut penafsiran Orde Baru), secara massal. KH. M. Bisri Syamsuri, yang kala itu menjabat sebagai Ra'is Aam DPP PPP, memandangnya sebagai ancaman terhadap Islam sehingga ia memprotes usulan tersebut dengan sangat keras. Ketika dilangsungkan *voting* atas pasal tersebut, para anggota NU diikuti faksi-faksi lain dalam PPP secara demonstratif meninggalkan ruang sidang (*walk out*).⁶⁰ Jelas di sini bahwa meski Pancasila telah diterima oleh semua kelompok sebagai dasar negara, masalah ideologi Islam tetap belum terselesaikan.

Tetapi, pada tahapan berikutnya, terjadi perpisahan ideologis antara kelompok modernis dan tradisional. Kelompok modernis tetap memandang bahwa kesempurnaan ajaran Islam menuntut

59 Alasan keluarnya NU dari Masyumi adalah perubahan struktur organisasi pada tahun 1949 yang tidak lagi memberi peran menentukan terkait masalah-masalah keagamaan dalam Majelis Syura, yang para anggotanya adalah ulama, khususnya ulama NU. Majelis Syura hanya menjadi Dewan Penasehat. Lebih dari itu, menurut NU, kelompok modernis telah mendominasi posisi-posisi politik dan tidak memberi kesempatan pada NU, sebaliknya jatah lima orang sebagai menteri ternyata diduduki oleh kelompok Masyumi. NU hanya menginginkan satu jatah sebagai Menteri Agama, tetapi kelompok modernis juga menolaknya. Keluarnya PSII dikarenakan PSII mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi dalam Kabinet sebagai kelompok independen. Lihat Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 35. Sebagai perbandingan lihat juga dalam Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, hlm. 117.

60 Martin Van Bruinessen, *NU: Tradisi, Relasi-Relasi Kuasa, dan Pencarian Wacana Baru*, terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 106.

adanya pelembagaan dalam kehidupan politik. Untuk meraih tujuan itu, maka yang pertama kali harus dilakukan adalah mendelegasikan sebanyak mungkin kekuatan Islam ke dalam birokrasi negara. Rasionalisasi dari strategi ini biasanya diungkapkan dengan istilah "politik representasi", yaitu keseimbangan jumlah umat Islam di Indonesia dengan penguasaan dalam struktur-struktur birokrasi. Artikulasi kelompok modernis mendapatkan yang sesungguhnya dalam organisasi ICMI yang berdiri pada tahun 1990. Sementara, kelompok Islam tradisional, dalam hal ini diwakili NU, mengafirmasi negara kesatuan Indonesia dengan yang berdasarkan Pancasila adalah sebagai bentuk yang final.

Perubahan kelompok tradisional ini terjadi pada 1984, ketika NU memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926 sebagai *jam'iyah diniyah ijtimaiyyah*, dan pada saat yang sama dinyatakan bahwa tujuan organisasi direalisasikan dalam wadah negara kesatuan RI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pancasila dicantumkan sebagai asas organisasi. Penerimaan kelompok ini atas kebijakan politik Orde Baru, terutama dalam hal penguatan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ia berpendapat bahwa Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara Republik Indonesia bukanlah agama, dan bahwa sila pertama Pancasila merupakan cerminan konsep tauhid Islam. Di sinilah titik persimpangan ideologis kelompok Islam tradisional dan modernis. Pandangan-pandangan NU tersebut, secara tegas berarti penolakan terhadap cita-cita negara Islam yang samar-samar masih mengendap di bilik-bilik gelap angan-angan kelompok modernis.⁶¹

Secara konseptual, komponen-komponen pokok yang ada di dalam pembangunan politik adalah bahwa pemerintah harus selalu mampu menanggapi setiap perubahan yang ada di dalam masyarakat, sebab suprastruktur dan infrastruktur politik yang ada akan berjalan

61 *Ibid*, hlm. 131.

efektif dan berfungsi secara optimal jika kesemuanya didukung oleh warga negara yang dinamis dan berada dalam naungan persamaan hukum dan perundang-undangan. Pencapaian hal-hal tersebut biasanya selalu akan menimbulkan permasalahan terutama menyangkut masalah identitas (jati diri) bangsa, legitimasi kekuasaan, partisipasi anggota masyarakat, serta menyangkut masalah pemerataan hasil-hasil pembangunan melalui sistem yang efektif yang menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Setiap kali kita berhasil mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut maka berarti kita "maju" di dalam melakukan pembangunan politik di dalam mengembangkan sistem demokrasi.

Sejak awal Indonesia berdiri, kehidupan politik dan hukum senantiasa diwarnai begitu rupa, tidak dalam pengertian hingar bingarnya demokrasi, tetapi justru secara mencolok dapat dikatakan oleh sentralisasi kekuasaan pada satu tangan, meskipun sebenarnya konstitusi telah memberi peluang yang cukup besar kepada hukum.

Orde Lama telah dikenal prestasinya dalam memberi identitas, kebanggaan nasional dan mempersatukan bangsa Indonesia. Namun demikian, Orde Lama pula yang memberikan peluang bagi kemungkinan kaburnya identitas tersebut (Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945). Beberapa peristiwa pada Orde Lama yang mengaburkan identitas nasional kita, di antaranya, adalah terjadinya pemberontakan PKI (Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1948, berlangsungnya Demokrasi Terpimpin, adanya pelaksanaan UUD Sementara pada tahun 1950, gerakan Nasakom dan pemberontakan PKI jilid II pada tahun 1965.

Sejak proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia masuk dalam suatu babak kehidupan baru sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat penuh. Dalam perjalanan sejarahnya bangsa Indonesia mengalami berbagai perubahan asas, paham, ideologi dan doktrin dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melalui berbagai hambatan dan ancaman yang

membahayakan perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta mengisi kemerdekaan. Wujud berbagai hambatan adalah adanya disintegrasi dan instabilisasi nasional sejak periode Orde Lama yang berpuncak pada pemberontakan PKI 30 September 1945 sampai lahirnya Supersemar sebagai titik balik lahirnya tonggak pemerintahan era Orde Baru yang merupakan koreksi total terhadap budaya dan sistem politik Orde Lama di mana masih terlihat kentalnya mekanisme, fungsi dan struktur politik yang tradisional berlandaskan ideologi-sosialisme-komunisme.

a. Konfigurasi Politik di Era Orde Lama.

Konfigurasi politik mengandung arti sebagai susunan atau konstelasi kekuatan politik yang secara dikotomis dibagi atas dua konsep yang bertentangan secara diametral, yaitu *konfigurasi politik demokratis* dan *konfigurasi politik otoriter*. Konfigurasi politik yang ada pada periode Orde Lama membawa bangsa Indonesia berada dalam suatu rezim pemerintahan yang otoriter dengan berbagai produk-produk hukum yang konservatif dan pergeseran struktur pemerintahan yang lebih sentralistik melalui ketatnya pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah. Pada masa ini pula politik kepartaian sangat mendominasi konfigurasi politik yang terlihat melalui revolusi fisik serta sistem yang otoriter sebagai esensi feodalisme.

Sedangkan di bawah kepemimpinan rezim Orde Baru yang mengakhiri tahapan tradisional tersebut, pembangunan politik hukum memasuki era lepas landas lewat proses Rencana Pembangunan Lima Tahun yang berkesinambungan dengan pengharapan Indonesia dapat menuju tahap kedewasaan (*maturing society*) dan selanjutnya berkembang menuju bangsa yang adil dan makmur.

Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya berupa pembubaran konstituante, diundangkan dengan resmi dalam Lembaran Negara tahun 1959 No. 75, Berita

Negara 1959 No. 69 berintikan penetapan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Salah satu dasar pertimbangan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah gagalnya konstituante dalam melaksanakan tugasnya. Pada masa ini Soekarno memakai sistem *Demokrasi Terpimpin*. Tindakan Soekarno mengeluarkan Dekrit pada tanggal 5 Juli 1959 dipersoalkan keabsahannya dari sudut yuridis konstitusional, sebab menurut UUDS 1950 Presiden tidak berwenang "memberlakukan" atau "tidak memberlakukan" sebuah UUD, seperti yang dilakukan melalui dekrit. Sistem ini yang mengungkapkan struktur, fungsi dan mekanisme, yang dilaksanakan ini berdasarkan pada sistem "*trial and error*" yang perwujudannya senantiasa dipengaruhi bahkan diwarnai oleh berbagai paham politik yang ada serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang begitu cepat berkembang. Maka problema dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berkembang pada waktu itu bukan masalah-masalah yang bersifat ideologis politik yang penuh dengan norma-norma ideal yang benar, tetapi masalah-masalah praktis politik yang mengandung realitas-realitas objektif serta mengandung pula kemungkinan-kemungkinan untuk dipecahkan secara baik, walaupun secara normatif ideal kurang atau tidak benar. Bahkan kemudian muncul penamaan sebagai suatu bentuk kualifikasi seperti "Demokrasi Terpimpin" dan "Demokrasi Pancasila". Berbagai "*experiment*" tersebut ternyata menimbulkan keadaan "*excessive*" (berlebihan) baik dalam bentuk "Ultra Demokrasi" (berdemokrasi secara berlebihan) seperti yang dialami antara tahun 1950-1959, maupun suatu kediktatoran terselubung (*verkapte diktatuur*) dengan menggunakan nama demokrasi yang dikualifikasi (*gekwalificeerde democratie*).

Sistem "*trial and error*" telah membuahkan sistem multi ideologi dan multi partai politik yang pada akhirnya melahirkan multi mayoritas, keadaan ini terus berlangsung hingga pecahnya pemberontakan DI/

TII yang berhaluan *theokratisme* Islam fundamental (1952-1962) dan kemudian Pemilu 1955 melahirkan empat partai besar yaitu PNI, NU, Masyumi dan PKI yang secara perlahan terjadi pergeseran politik ke sistem catur mayoritas. Kenyataan ini berlangsung selama 10 tahun dan terpaksa harus kita bayar tinggi berupa: (1) Gerakan separatis pada tahun 1957; dan (2) Konflik ideologi yang tajam yaitu antara Pancasila dan ideologi Islam, sehingga terjadi kemacetan total di bidang Dewan Konstituante pada tahun 1959.

Oleh karena konflik antara Pancasila dengan *theokratis* Islam fundamentalis itu telah mengancam kelangsungan hidup Negara Pancasila 17 Agustus 1945, maka terjadilah Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dengan tujuan kembali ke UUD 1945 yang kemudian menjadi dialog Nasional yang 'seru' antara yang Pro dan yang Kontra. Yang Pro memandang dari kacamata politik, sedangkan yang Kontra dari kacamata Yuridis Konstitusional. Akhirnya memang masalah Dekrit Presiden tersebut dapat diselesaikan oleh pemerintah Orde Baru, sehingga Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kelak dijadikan salah satu sumber hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya pada perang revolusi yang berlangsung tahun 1960-1965, yang sebenarnya juga merupakan prolog dari pemberontakan Gestapu/PKI pada tahun 1965, telah memberikan pelajaran-pelajaran politik yang sangat berharga walau harus kita bayar dengan biaya tinggi.

b. Kiprah Politik Kaum Sarungan.

Masa Orde Lama berlangsung selama kurun waktu 1945–1966, atau tepatnya dimulai sejak proklamasi kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 dan berakhir 11 Maret 1966. Selama kurun waktu itu, oleh Deliar Noer dibagi menjadi tiga masa, yaitu: masa revolusi (1945-1949), masa demokrasi liberal atau demokrasi parlementer (1950-1959), dan masa demokrasi terpimpin (1959-1965).

Di jaman revolusi kemerdekaan, NU mengerahkan kekuatan berupa *political power* dengan membentuk tiga kelompok barisan jihad: *Barisan Hisbullah* dipimpin H. Zainul Arifin, *Barisan Sabilillah* dipimpin oleh KH. Masykur, dan *Barisan Mujahidin* dipimpin oleh KH. A. Wahab Hasbullah. Tiga kekuatan ini bersama komponen kekuatan lainnya bersepakat untuk maju ke garis depan untuk menghadapi kekuatan militer Belanda yang berupaya kembali ke Indonesia._

Klimaksnya, NU mengumandangkan Resolusi Jihad oleh Rais Akbar Syuriah PBNU KH. Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober 1945, yang mewajibkan kepada seluruh umat Islam untuk melakukan jihad, mengangkat senjata melawan Inggris (sekutu) yang disusupi oleh tentara NICA (Belanda). Resolusi jihad ini mampu mematahkan perlawanan sekutu yang ingin menguasai kota Surabaya. Peristiwa ini menimbulkan gugurnya *syuhada-syuhada* di medan tempur di Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Namun sayang sekali, dokumen sejarah nyaris terlupakan oleh bangsa Indonesia.

Dalam percaturan politik, meski pada awal kemerdekaan umat Islam memiliki berbagai wadah saluran politik, seperti: NU, PSII, PERSIS, Muhammadiyah, dan Perti, namun umat Islam sepakat membentuk wadah tunggal sebagai sarana perjuangan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi politiknya. Wadah tersebut adalah Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia). Kesepakatan ini diambil berdasarkan Kongres Umat Islam Indonesia (KUUI) di Yogyakarta tanggal 7–8 Nopember 1945, di mana terdapat dua keputusan penting, yaitu: (1) Masyumi adalah satu-satunya partai politik Islam di Indonesia; dan (2) Partai Islam di luar Masyumi keberadaanya tidak diakui.

Sejalan dengan dikembangkannya sistem demokrasi liberal oleh pemerintah Orde Lama, maka keberadaan Masyumi sebagai wadah tunggal aspirasi politik umat Islam mengalami goncangan. Goncangan

pertama terjadi pada bulan Juli 1947, yaitu dengan keluarnya unsur PSII dalam Masyumi. Goncangan yang paling dahsyat bagi Masyumi terjadi setelah NU mengikuti jejak PSII untuk meninggalkan Masyumi berdasarkan keputusan Mukhtamar NU di Palembang pada tanggal 29 April 1952. Keputusan NU ini kemudian disusul oleh Perti. Dari sinilah awal kiprah kepartaian NU yang dilakukan secara mandiri.

Periode antara tahun 1952-1955 merupakan masa perluasan dan konsolidasi partai baru ini. Dengan komitmen pada aktifitas politik, maka sekarang keberadaannya banyak tergantung pada pencapaian perolehan suara dalam pemilu pertama yang dijadwalkan pada bulan September 1955. NU boleh berbangga bahwa 70% anggota Masyumi merupakan anggota NU dan para simpatisannya saat itu juga menarik dukungan mereka terhadap Masyumi. Akhirnya, pada pemilu pertama tersebut, NU muncul sebagai partai ketiga terbesar, dengan menarik hampir 7 juta atau 18,4 % dari total suara nasional serta mendongkrak perwakilan di parlemen dari 8 orang (ketika masih berada di Masyumi) menjadi 45 orang. Kemenangan ini tentu saja melahirkan luapan kegembiraan bagi warga *nahdhiyyin*, karena mereka merasa beratnya harapan dalam pertarungan tersebut, terlebih-lebih panitia pemenangan pemilu NU sendiri punya prediksi hanya akan memperoleh 20–25 kursi saja. Demikian juga halnya dengan susunan kabinet berdasarkan hasil Pemilu 1955 tersebut, NU mampu mendudukkan 5 orangnya dalam kabinet, sama dengan Masyumi, sementara dari PSII 2 orang dan Perti 1 orang.

Peranan perpolitikan NU mengalami penurunan, setelah pemerintah Orde Lama menerapkan sistem demokrasi terpimpin sebagai ganti dari sistem demokrasi liberal, yaitu setelah pemerintahan Soekarno membubarkan parlemen hasil Pemilu 1955 karena dianggap gagal melakukan tugasnya berdasarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959. Penurunan ini menyebabkan timbulnya perbedaan sangat tajam yang menjurus pada perpecahan antara Masyumi dan Liga Muslimin

(NU, PSII, dan Perti) dalam menyikapi diterapkannya demokrasi terpimpin. Masyumi secara tegas menyatakan menolak, sementara Liga Muslimin yang dipelopori oleh NU menyatakan menerima. Masyumi bahkan menilai bahwa ikut serta dalam demokrasi terpimpin Soekarno yang otoriter merupakan penyimpangan terhadap ajaran Islam. Akan tetapi, Liga Muslimin menganggapnya sebagai sikap realistis dan pragmatis. Menurut Fachry Ali dan Bachtiar Efendy, keikutsertaan Liga Muslimin, terutama NU, hanya bersifat strategis dan bukan berarti idealismenya bergeser. Sebagai implikasi dari kerasnya penolakan Masyumi ini, maka pada tahun 1960 pemerintah rezim Soekarno memerintahkan agar Masyumi dibubarkan.

Hal demikian ini terjadi akibat adanya pemusatan kekuasaan sebagai konsekuensi dari diterapkannya demokrasi terpimpin serta juga sedikitnya wakil Islam dalam parlemen atau DPR-GR yang diangkat sendiri oleh Soekarno. Jika dalam Pemilu 1955 kelompok Islam diwakili oleh sebanyak 115 orang, maka dalam DPR-GR turun secara drastis menjadi 43 orang (36 orang dari NU, 5 orang dari PSII, dan 2 orang dari Perti) yang jika ditambah dengan anggota dari golongan dan lain-lain --sebanyak 24 orang-- jumlahnya menjadi 67 orang. Sementara itu, wakil golongan Nasionalis mencapai 94 orang dan golongan komunis 81 orang, di mana jumlah anggota DPR-GR seluruhnya adalah 383 orang.

Yang jelas, selama NU berkiprah di panggung politik praktis pada era Orde Lama, ternyata banyak prestasi yang disandangnya, diantaranya adalah: *Pertama*, penyelenggaraan Pemilu pertama diserahkan kepada sebuah panitia Pemilu yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil partai politik. Jadi, tidak dilaksanakan oleh pemerintah. Hal yang demikian dikenang dan dicatat oleh sejarah sebagai Pemilu yang diselenggarakan berdasarkan *policy* Menteri Dalam Negeri Mr. Soenarjo (dari NU). Pada Pemilu ini, NU meraih 45 kursi di parlemen

(DPR), tidak jauh selisihnya dari perolehan Masyumi dan PNI yang masing-masing menempatkan 57 wakil di lembaga parlemen.

Kedua, lahirnya PP No. 10 yang isinya membatasi aktifitas ekonomi para pengusaha asing serta bertujuan memproteksi dan mendorong agar para pengusaha pribumi dapat berkembang. PP ini lahir pada saat Departemen Perdagangan dipimpin oleh Menteri dari NU, yaitu Drs. Rahmat Mulyoamiseno. *Ketiga*, peng gagasan berdirinya masjid Istiqlal oleh KH. A. Wahid Hasyim, selaku Menteri Agama saat itu, dan disetujui oleh Presiden Soekarno. Adapun pelaksanaannya direalisasikan pada masa Departemen Agama dipimpin oleh menteri dari NU (KH. M. Ilyas). *Keempat*, peng gagasan pendirian IAIN oleh KH. Wahib Wahab (Menteri Agama saat itu). *Kelima*, realisasi penerjemahan al-Qur'an ke dalam bahasa Indonesia (pada masa Depag dipimpin oleh menteri dari NU, Prof. KH. Syaifuddin Zuhri). *Keenam*, penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) yang diprakarsai oleh Menag dari NU, yaitu K.H. M Dahlan, yang di kemudian hari menjadi acara nasional, silaturrohmi para *gori'* dan *huffadz* se-tanah air.

Ketujuh, peng gagasan terbentuknya "Kabinet Kaki Empat" (PNI-PKI-Masyumi-NU), perlawanan langsung terhadap aksi-aksi PKI di segala bidang. Ketika Prof. Dr. Hamka dihantam PKI, NU melalui media massa yang dimilikinya, yaitu surat kabar harian *Duta Masyarakat* (Dumas) secara terang-terangan membela Hamka. Puncak dari perlawanan NU terhadap PKI adalah gagalnya G 30 S PKI. NU tercatat sebagai partai politik pertama yang mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar PKI dibubarkan. Sikap tegas ini dicetuskan oleh NU pada tanggal 5 Oktober 1965 ketika masyarakat Indonesia masih bersikap ragu-ragu tentang siapa yang menjadi arsitek gerakan 30 S/PKI tersebut. Dan, *kedelapan*, ketika HMI dan Gasbindo diancam akan dibubarkan oleh pemerintah yang dipengaruhi oleh PKI,

Prof KH. Syaifuddin Zuhri (Menteri Agama ketika itu) membelanya dengan jabatan dirinya sebagai garansinya.

Di sini, patut dicatat bahwa *mode of thought* NU dalam berpolitik adalah menggunakan paradigma politis-ideologis dengan memegang teguh ajaran Islam secara normatif-teologis. Konsekwensi lebih lanjut adalah perilaku politik NU cenderung bersifat eksklusif, terutama bila berhadapan atau dihadapkan pada komunitas nasionalis atau sekuler. Tapi dalam konteks ini sebagaimana dinyatakan oleh M. Ali Haidar, bahwa konsep Sunnisme yang dianut oleh NU merupakan konsep jalan tengah yang lebih mementingkan harmoni dan kestabilan sosial. Konsep ini pula agaknya yang mendorong NU tampil lebih lentur dan lebih akomodatif.

Hasil pemilu pertama yang dilaksanakan pada 29 September 1955 cukup mengejutkan banyak orang. Bukan cuma karena tidak menunjukkan kemenangan umat Islam, tapi juga menunjukkan perimbangan kekuatan antara dua partai Islam besar, NU dan Masyumi, dan rival mereka, PNI dan PKI. Dari jumlah 30 lebih partai yang ikut, PNI meraih kemenangan dengan suara terbanyak 22,3 persen dari jumlah politik, Masyumi 20,9 persen, NU 18,4 persen, serta PKI 16,4 pesen. Proporsi perolehan suara partai-partai Islam betul-betul berimbang dengan partai-partai nasionalis, komunis, dan Kristen. Hasil pemilu ini membuyarkan harapan partai-partai Islam untuk menang.⁶²

Putaran kedua pemilu untuk memilih anggota-anggota konstituante pada akhir tahun 1955 juga menunjukkan hasil yang sama, pembagian kekuatan antara kaum nasionalis dan Islam. Konstituante bertugas menyusun UUD yang baru yang akan menggantikan UUDS 1950. Akan tetapi, konstituante harus memutuskan terlebih dahulu

62 Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslim and Democratization in Indonesia* (Oxford: University Press, 2000), hlm. 87.

persoalan apakah Indonesia merupakan negara sekuler (*non-religius*) atau negara Islam. Meski konstituante berhasil mencapai sejumlah besar kesepakatan, namun mereka mengalami jalan buntu menyangkut isu hangat tentang Islam dan negara.⁶³ Menyadari situasi semacam ini, meskipun kelompok Islam terus berusaha untuk mengesahkan Piagam Jakarta yang merupakan konsensus anggota-anggota BPUPKI sebelum proklamasi kemerdekaan, namun mereka hanya berhasil memperoleh jumlah suara seperti yang mereka peroleh dalam pembahasan mengenai dasar falsafah negara.⁶⁴

Sebagai seorang yang gigih membela Pancasila, Presiden Soekarno, didukung oleh Angkatan Bersenjata mengeluarkan dekrit 5 Juli 1959 tentang "kembali ke Undang-Undang Dasar 1945". Pada saat yang sama, Soekarno juga mengungkapkan konsep "Demokrasi Terpimpin" yang sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 1957. Selama periode demokrasi terpimpin (1959-1965), keputusan-keputusan politik, termasuk pengangkatan anggota parlemen ditentukan sendiri oleh Soekarno. Merespons sistem ini, yang sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) serta beberapa pemimpin politik yang lain menunjukkan oposisi keras mereka. Penentangan ini bahkan membawa sejumlah pemimpin Masyumi dan PSI terlibat dalam pemberontakan PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia), sementara beberapa pemimpin yang lain ambil bagian dalam pendirian Liga Demokrasi.⁶⁵

63 *Ibid*, hlm. 86

64 Pembahasan tentang falsafah negara menjadi perdebatan yang sangat alot, antara sebagian orang Islam yang membawa Piagam Jakarta yang dianggap sama dengan Piagam Madinah dan kaum nasionalis yang berasaskan pancasila. Lagi-lagi Islam dan negara dipersoalkan sehingga mencapai jalan buntu. Akhirnya melakukan konsensus keanggotaan. Sedangkan Piagam Jakarta hanya didukung oleh 48 persen dari anggota. Lebih jelasnya baca Robert W. Hefner, *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, terj. Ahmad Baso (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 92.

65 Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hlm. 37.

Banyak di antara mereka yang terlibat, baik dalam pemberontakan maupun gerakan demokrasi, ditangkap dan dipenjara. Di antara para pemimpin yang terlibat dalam pemberontakan adalah Muhammad Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap. Soekarno tidak hanya memenjarakan para pemimpin Masyumi, namun juga melarang partai ini pada 13 September 1960. Di lain pihak ia memberi kesempatan yang baik kepada Partai Komunis dan mengumumkan kebijakan tentang Nasakom (Nasionalis-Agama-Komunis). Memang, partai-partai Islam yang lain berpartisipasi dalam Demokrasi Terpimpin, dan beberapa pemimpin mereka diangkat sebagai menteri. Namun demikian, mereka tidak bisa menghindari ketegangan dengan kaum Komunis yang berusaha menjadikan Indonesia sebagai negara Komunis. Usaha Komunis mencapai puncaknya dengan gagalnya kudeta Komunis pada 30 September 1965.⁶⁶

3. Politik Kaum Sarungan di Masa Orde Baru (1966-1998)

Gagalnya kudeta tersebut sekaligus mengakhiri masa pemerintahan Orde Lama yang dipimpin Soekarno. Inilah yang menandai awal pemerintahan rezim Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Masa Orde Baru ditandai dengan hubungan yang pasang-surut antara Islam dan Negara. Pada masa-masa awal kepemimpinannya, pemerintah Orde Baru mengkhawatirkan politisasi Islam dan kemampuannya menerangkan gerakan massa. Bentuk yang paling tampak dari kompetisi politik di bawah Orde Baru adalah antara pemerintahan militer, yang didominasi oleh kelompok abangan dan kekuatan sipil Islam, yang jauh lebih lemah daripada pemerintah. Walaupun serangan ideologi kuat, tapi kemudian pada akhir tahun 1980-an para aktivis Muslim menunjukkan kepercayaan diri yang baru dengan lahirnya ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia).

66 *Ibid*, hlm. 38.

ICMI adalah organisasi yang disponsori Soeharto dan dirancang untuk memobilisasi dukungan umat Islam pada saat satu segmen militer menentang Soeharto. Soeharto juga ingin menggunakan ICMI untuk menghadang gerakan pro-demokrasi dengan cara membelanya berdasarkan garis keagamaan. Sekalipun diresmikan dengan irama yang dimainkan oleh presiden, tapi beberapa anggota ICMI ingin 'menari' berdasarkan irama yang dimainkan orang lain. Sejak awal sudah ada ketegangan di tubuh ICMI antara mereka yang ingin memanfaatkan ICMI untuk bekerja sama dengan rezim penguasa dan mereka yang ingin memanfaatkan ICMI untuk proses demokratisasi. Ketegangan ini tampak semakin jelas pada bulan-bulan setelah simposium di Malang dan diperparah oleh adanya perdebatan yang diperbarui mengenai hubungan yang pas antara politik Islam dan demokrasi.⁶⁷

Satu-satunya kelompok Islam yang berada di luar jalur struktur kekuasaan yang menentang keberadaan ICMI adalah NU yang diketuai oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dengan pernyataan yang kritis dan sinis, Gus Dur langsung mengecam ICMI sebagai organisasi sektarian dan melakukan rekonfesionalisasi terhadap politik dan masyarakat.⁶⁸ Sejak pertengahan tahun 1980-an, Gus Dur sudah mulai mentransformasikan dan memanfaatkan NU sebagai sarana pengembangan masyarakat tingkat bawah (*grassroot*), toleransi dan pluralisme. Wacana yang sedang merebak dalam kelompok ini, bukanlah ideologi, dan kesempurnaan Islam tidak menuntut formalisasi ajaran dalam kehidupan bernegara. Semua kelompok dalam wadah negara kesatuan RI memiliki hak-hak politik, sosial, dan ekonomi yang sama.

Perjuangan kelompok ini pun tidak lagi terarah pada penguasaan birokrasi, tapi lebih pada penguatan-penguatan di tingkat bawah untuk menciptakan *civil society*. Tak heran jika gerakan kelompok

67 Rebert W. Hefner, *Civil Islam*, hlm. 223.

68 *Ibid.*, hlm. 226.

ini banyak bersinggungan dengan LSM-LSM, sehingga dalam Islam tradisional ini bisa juga ditemukan unsur-unsur populis-kiri karena kedekatan wacana politik yang dikembangkan oleh kelompok tersebut.⁶⁹ Apakah dengan (pilihan) demikian, persoalan relasi agama dan negara sudah dianggap tuntas? Terbukti, wacana yang merebak pasca runtuhnya Orde Baru adalah bangkitnya kembali politik aliran berbasis ideologis. Kelompok-kelompok Islam kembali bergeliat mengulang romantisme sejarah masa lalunya dengan mendirikan partai-partai politik yang berbasis aliran keagamaan. Di antaranya, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Masyumi Baru, Partai Keadilan, Partai Umat Muslimin Indonesia, Partai Syariat Islam Indonesia, Partai Islam Indonesia, Partai Amanat Nasional, PPP, dan beberapa partai dari kelompok NU. Dalam NU sendiri terpolarisasi dalam beberapa partai, di antaranya PKB, PKU, PNU, Partai Sunni. Tetapi partai yang memperoleh basis dukungan konstituen (NU) terbanyak di antara faksi-faksi politik NU tersebut adalah PKB.

Meski ada beberapa partai Islam yang mengklaim sebagai partai yang terbuka (*inklusif*) dan tidak berasaskan Islam, tetapi kita bisa melihat realitas politik dari kemunculan partai-partai tersebut yang mengaspirasikan satu kepentingan politik dari kelompok Islam tertentu. Apalagi, naiknya Gus Dur ke posisi puncak kekuasaan sebagai presiden RI beberapa tahun lalu dianggap sebagai perlawanan terhadap kelompok nasionalis sekuler (PDIP), yang kala itu sebenarnya Megawati lah yang lebih berhak menjadi presiden karena memenangkan suara mayoritas pada pemilu 1999. Kita tahu bahwa ketika Gus Dur menjadi presiden berkat dukungan Poros Tengah yang mayoritas berasal dari partai-partai Islam dan Amien Rais menjadi ketua MPR.

69 Ahmad Zainul Hamdi, Fawaizul Umam, dan Khoirul Faizin, '*Aliran Sungai*' Politik Aliran (Surabaya: Jurnal Gerbang, Edisi 1, th. II, Januari-Maret, 1999), hlm. 21.

Namun, orang tidak mudah gegabah mengambil kesimpulan bahwa tengah terjadi koalisi yang prinsipil antara Islam tradisional (*asosiasional*) dan Islam modernis (*institusional*). Banyak yang berpendapat bahwa Gus Dur menjadi presiden karena kecelakaan (*by accident*). Megawati tidak bisa diterima oleh kalangan Islam modernis karena ia perempuan, sedang Habibie yang selama ini menjadi kartu mati karena keterkaitannya dengan Orde Baru. Maka, pilihan 'terpaksa' jatuh ke Gus Dur. Tetapi, nampaknya Gus Dur tidak mampu bertahan lama dari kursi kepresidenannya karena yang justru paling getol menjatuhkan Gus Dur adalah Poros tengah itu sendiri. Begitulah dunia politik sehingga benar kiranya jika kamus politik mengatakan bahwa "*tidak ada kawan yang abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan pribadi*". Tentu saja, kejatuhan Gus Dur tersebut sempat memperparah hubungan politik kelompok Islam tradisional (NU) dan Islam Modernis (Muhammadiyah, Masyumi, dan para *underbow*-nya).

Uraian dalam buku ini tentu tidak akan menguraikan panjang lebar tentang konflik politik seputar itu, tetapi yang ingin ditegaskan di sini bahwa ternyata belum ada kesepakatan yang kokoh—apalagi pemikiran yang serius—tentang apa dan bagaimana memposisikan agama (Islam) yang sebenarnya dalam negara. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh komunitas-komunitas politik (termasuk kelompok-kelompok Islam) untuk berperan menyelesaikan beragam masalah dalam masa transisi demokrasi ini. Malah yang terjadi saat ini, di tingkat elit politik Islam sendiri, adalah konflik-konflik *interest* antar pribadi-pribadi elit yang melibatkan massa pendukungnya. Masing-masing pribadi kemudian berpikir bagaimana bisa menang dalam memperebutkan kekuasaan. Agama dalam berbagai 'bentuk'nya hanya dijadikan alat dan jargon politik semata untuk memperoleh dukungan sebanyak-banyaknya. Akibatnya kesadaran untuk membangun komitmen kebangsaan (*nation-building*) yang kokoh begitu mudah

diabaikan. Hal-hal tersebut setidaknya menunjukkan bahwa kekuatan politik Islam sebenarnya telah gagal menunjukkan jati diri dan perannya sebagai bagian terpenting dari bangsa ini. Karena, mereka tidak mampu memberikan tawaran konkret bagi penyelesaian terhadap berbagai persoalan yang dihadapi bangsa ini.

Sejarah menunjukkan bahwa rezim Orde Baru telah banyak melakukan 'pemasangan' terhadap hak-hak politik warga negara terutama pada kalangan umat Islam, tak terkecuali kalangan kaum sarungan. Pembangunan memang dapat berjalan dengan cukup baik pada rezim Orde Baru di mana tingkat pertumbuhan ekonomi bahkan pernah mencapai 7% (tujuh persen) namun keberhasilan itu hanya bersifat 'semu' karena semua pembangunan dibiayai dari hutang luar negeri yang berakibat timbulnya krisis moneter dan tumbuh sehatnya praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pemerintah rezim Orde Baru mengganti format sistem politik Orde Lama dengan sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu menjadikan Pancasila sebagai landasan ideologi berbangsa dan bernegara.⁷⁰ Pemerintah Orde Baru yang sangat didominasi oleh militer memiliki

70 Antara partai politik dengan pemilihan umum bagaikan dua sisi dalam mata uang yang sama. Mereka tidak dapat dipisahkan satu sama lain dikarenakan keduanya saling bergantung dan mengisi. Pada masa sesudah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem multi partai yang ditandai dengan hadirnya 25 partai politik. Hal ini ditandai dengan Maklumat Wakil Presiden No. X tanggal 16 Oktober 1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. Menjelang Pemilihan Umum 1955 yang berdasarkan demokrasi liberal bahwa jumlah parpol meningkat hingga 29 parpol dan juga terdapat peserta perorangan. Pada masa diberlakukannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, sistem kepartaian Indonesia dilakukan penyederhanaan dengan Penpres No. 7 Tahun 1959 dan Perpres No. 13 Tahun 1960 yang mengatur tentang pengakuan, pengawasan dan pembubaran partai-partai.[16] Kemudian pada tanggal 14 April 1961 diumumkan hanya 10 partai yang mendapat pengakuan dari pemerintah, antara lain adalah sebagai berikut: PNI, NU, PKI, PSII, PARKINDO, Partai Katholik, PERTI MURBA dan PARTINDO. Namun, setahun sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1960, PSI dan Masyumi dibubarkan. Dengan berkurangnya jumlah parpol dari 29 parpol menjadi 10 parpol tersebut, hal ini tidak berarti bahwa konflik ideologi dalam masyarakat umum dan dalam kehidupan politik dapat berkurang. Untuk mengatasi hal ini maka diselenggarakan pertemuan parpol di Bogor pada tanggal 12 Desember 1964 yang menghasilkan "Deklarasi Bogor".

persepsi yang khas terhadap partai politik. Partai politik dianggap sebagai "pesaing dalam memperoleh kekuasaan dan penggerak keresahan rakyat". Alternatifnya, pemerintah membesarkan partai Golkar sambil mengecilkan partai-partai politik lainnya. Pilihan ini dianggap sangat wajar karena pemerintah Orde Baru menerapkan *hegemonic party system* dengan menempatkan partai Golkar sebagai kekuatan sosial politik yang dominan, sementara partai-partai politik lainnya hanya berfungsi *artifisial*. Dalam pandangan Deliar Noer, sistem kepartaian yang diterapkan oleh rezim Orde Baru adalah "sistem kepartaian setengah partai".

a. Konfigurasi Politik di Era Orde Baru.

Peristiwa yang lazim disebut Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI) menandai pergantian orde, yakni dari Orde Lama ke Orde Baru. Pada tanggal 1 Maret 1966 Presiden Soekarno dituntut untuk menandatangani sebuah surat yang memerintahkan pada Jenderal Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang perlu untuk keselamatan negara dan melindungi Soekarno

Sedangkan dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 20 Pebruari 1968 sebagai langkah peleburan dan penggabungan ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya maka didirikannya Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII, dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya. Dengan adanya pembinaan terhadap parpol-parpol dalam masa Orde Baru maka terjadilah perampingan parpol sebagai wadah aspirasi warga masyarakat kala itu, sehingga pada akhirnya dalam Pemilihan Umum 1977 terdapat 3 kontestan, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta satu Golongan Karya. Hingga Pemilihan Umum 1977, pada masa ini peserta pemilu hanya terdiri sebagaimana disebutkan diatas, yakni 2 parpol dan 1 Golkar. Dan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memenangkan Pemilu. Hal ini mengingat Golkar dijadikan mesin politik oleh penguasa saat itu.

sebagai Presiden. Surat yang kemudian dikenal dengan sebutan *Surat Perintah Sebelas Maret* (Supersemar) itu diartikan sebagai media pemberian wewenang kepada Soeharto secara penuh.

Orde Baru dikukuhkan dalam sebuah sidang MPRS yang berlangsung pada Juni-Juli 1966. Di antara ketetapan yang dihasilkan sidang tersebut adalah mengukuhkan Supersemar dan melarang PKI berikut ideologinya tumbuh dan berkembang di Indonesia. Menyusul PKI sebagai partai terlarang, setiap orang yang pernah terlibat dalam aktivitas PKI ditahan. Sebagian diadili dan dieksekusi, sebagian besar lainnya diasingkan ke pulau Buru. Pada masa Orde Baru pula pemerintah menekankan stabilitas nasional dalam program politiknya dan untuk mencapai stabilitas nasional terlebih dahulu diawali dengan apa yang disebut dengan 'konsensus nasional'.

Ada dua macam konsensus nasional pada masa pemerintahan Orde Baru, yaitu: Pertama, berwujud kebulatan tekad pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Konsensus pertama ini disebut juga dengan 'konsensus utama'. Sedangkan konsensus kedua adalah konsensus mengenai cara-cara melaksanakan konsensus utama. Artinya, konsensus kedua lahir sebagai lanjutan dari konsensus utama dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Konsensus kedua lahir antara pemerintah dan partai-partai politik dan masyarakat.

Secara umum, elemen-elemen penting yang terlibat dalam perumusan konsensus nasional antara lain pemerintah, TNI dan beberapa organisasi massa. Konsensus ini kemudian dituangkan ke dalam TAP MPRS No. XX/1966, sejak itu konsensus nasional memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia. Beberapa hasil konsensus tersebut, antara lain, adanya penyederhanaan partai politik dan keikutsertaan TNI/Polri dalam keanggotaan MPR/DPR. Berdasarkan semangat konsensus nasional itu pemerintah Orde Baru dapat melakukan tekanan-tekanan politik terhadap partai politik

yang memiliki basis massa luas. Terlebih kepada PNI yang nota bene partai besar dan dinilai memiliki kedekatan dengan rezim terdahulu. Pemerintah orde baru juga melakukan tekanan terhadap partai-partai dengan basis massa Islam. Satu contoh ketika para tokoh Masyumi ingin menghidupkan kembali partainya yang telah dibekukan pemerintah Orde Lama, pemerintah memberi izin dengan dua syarat. *Pertama*, tokoh-tokoh lama tidak boleh duduk dalam kepengurusan partai. *Kedua*, masyumi harus mengganti nama sehingga terkesan sebagai partai baru. Pada Pemilu 1971 partai-partai politik disaring melalui verifikasi hingga tinggal sepuluh partai politik yang dinilai memenuhi syarat untuk menjadi peserta pemilu. Dalam pemilu kali ini didapati Golongan Karya (Golkar) menjadi peserta pemilu. Pada mulanya Golkar merupakan gabungan dari berbagai macam organisasi fungsional dan kekaryaan, yang kemudian pula pada 20 Oktober 1984 mendirikan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar). Tujuannya antara lain memberikan perlindungan kepada kelompok-kelompok fungsional dan mengkoordinir mereka dalam front nasional. Sekber Golkar ini merupakan organisasi besar yang dikonsolidasikan dalam kelompok-kelompok induk organisasi seperti SOKSI, KOSGORO, MKGR dan lainnya sebagai "*Political Battle Unit*" rezim orde baru.

Pasca pemilu 1971 muncul kembali ide-ide penyederhanaan partai yang dilandasi penilaian bahwa hal tersebut harus dilakukan karena partai politik selalu menjadi sumber yang mengganggu stabilitas, gagasan ini menimbulkan sikap Pro dan Kontra karena dianggap membatasi atau mengekang aspirasi politik dan membentuk partai-partai hanya ke dalam golongan nasional, spiritual dan karya. Pada tahun 1973 konsep penyederhanaan partai (Konsep Fusi) sudah dapat diterima oleh partai-partai yang ada dan dikukuhkan melalui Undang-Undang No. 3/1975 tentang Partai Politik dan Golongan, sistem fusi

ini berlangsung hingga lima kali Pemilu selama pemerintahan orde baru (1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997).

b. Kiprah Politik Kaum Sarungan.

Dalam format politik Orde Baru yang demikian itu, maka posisi partai-partai politik, tak terkecuali NU sebagai saluran politik kaum sarungan ketika itu, yang menampung dan menyalurkan aspirasi umat Islam menjadi termarginalkan dan sangat dibatasi ruang geraknya. Realitas ini membawa konsekwensi logis bahwa perilaku politik warga NU tidak dapat lagi leluasa berjuang menyuarakan Islam dengan menggunakan Islam sebagai ideologi politik.

Meskipun warga NU cukup besar peranannya dalam upaya meruntuhkan rezim Orde Lama, namun di era Orde Baru, warga NU masih tetap dipinggirkan. Berbagai tekanan menimpa NU sehingga perjalanan NU menjadi terseok-seok. Pada Pemilu 1971 yang diharapkan bisa berjalan secara jurdil dan demokratis, tidaklah terwujud. Berbagai upaya telah dilakukan oleh penguasa rezim Orde Baru untuk memarginalkan kekuatan NU. Namun dengan upaya yang maksimal yang dilakukan warga *nahdliyyin*, NU masih mampu mempertahankan diri dengan menggaet 58 kursi. Dalam Pemilu 1971 itu, NU menjadi pemenang kedua setelah partai Golkar yang notabene kepanjangan tangan Orde Baru. NU tercatat sebagai satu-satunya orsospol yang mampu mengimbangi keperkasaan Golkar waktu itu.

Pada tanggal 5 Januari 1972, rezim Orde Baru kemudian melakukan restrukturisasi politik dengan menyederhanakan partai politik yang ada. Empat partai Islam, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti ('dipaksa' berfusi) menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan presidennya KH. Dr. Idham Khalid (NU) dan HMS Mintarja, SH (Parmusi) sebagai ketua umum partai. Pada sisi lain, terdapat Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan hasil fusi partai-

partai nasionalis, yaitu PNI, Parkindo, IPKI, Murba dan Partai Katolik, di samping "partai" pemerintah Orde Baru, yakni Golkar .

Meskipun sudah berubah wajah, NU selalu ditekan dan dipinggirkan. Sebagai pilar utama, rezim Orde Baru barupaya keras 'membonsai' NU dengan memperkecil peran politisi warga *nahdliyyin* di PPP dan lebih memberi peluang peran politisi dari unsur non-NU. Satu persatu lembaga penting di PPP disterilkan dari politisi NU (misalnya presiden partai). Juga, lembaga Syuro (wadah ulama NU berkumpul) pada partai tersebut di bawah kendali KH. Bisri Syamsuri 'dihapuskan' melalui kaki tangan rezim Orba, Dr. Jaelani Naro serta masih banyak lagi upaya-upaya lain rezim Orde Baru dalam memarginalkan politisi NU.

Marginalisasi itu berjalan terus menerus hingga sampai akhirnya NU kembali ke *khittah* 1926, pada muktamar NU ke-27 di Sukorejo Situbondo tahun 1984. Inti dari kembali ke *khittah* 1926 adalah keinginan untuk kembali pada semangat perjuangan awal, menjadi ormas sosial keagamaan. Keputusan penting lainnya pada muktamar tersebut adalah NU secara formal menerima Pancasila sebagai asas tunggal atau landasan dasar NU. Perubahan-perubahan ini memperlihatkan kemampuan NU untuk tidak hanya terpaku pada tradisi-tradisi keagamaan dan sejarahnya, tetapi juga mampu menyesuaikan tantangan perubahan zaman.

Harus diakui bahwa di masa lalu ada *mutual misunderstanding* antara Islam sebagai agama dan Pancasila sebagai ideologi. Letak kesalahpahaman itu, menurut Kuntowijoyo, terletak lebih pada berbagai kepentingan politik dari pada dalam substansinya. Sebenarnya, tidak perlu ada salah paham substansi, sebab substansi keduanya jelas berbeda: Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Permainan politiklah yang mengeksploitasi perbedaan itu supaya meruncing. Usaha-usaha untuk mendudukkan perkaranya banyak dilakukan, tapi rupanya semuanya tenggelam oleh hiruk-pikuk

politik. Sebagai ideologi, Pancasila adalah obyektifikasi dari agama-agama. Ini berarti unsur-unsur obyektif agama-agama ada dalam Pancasila. Sila-sila dalam Pancasila tidak satu pun yang bertentangan dengan Islam, dan sebaliknya. Tidak ada satu pun dari ajaran Islam yang bertentangan dengan Pancasila. Dengan demikian, Pancasila mendapat dukungan ganda: Ia adalah ideologi dengan *categorical imperative* dan melalui proses internalisasi (jadi tidak secara mekanis, tidak dengan sendirinya, tapi dengan niat dan kesadaran) ia dapat masuk dalam wilayah agama.

Untuk mengetahui lebih jauh kenapa NU menerima Pancasila sebagai asas tunggal, ada baiknya jika direfleksi kembali penjelasan KH. Achmad Shiddiq sebagaimana terdapat dalam kertas kerjanya yang berjudul "Pemulihan *Khittah* NU 1926" yang dibagikan pada peserta muktamar. Menurutnya, penerimaan Pancasila sebagai asas tunggal NU bukan sekedar taktik politik, tapi lebih berdasarkan pada prinsip-prinsip pendirian NU. Para pemimpin umat Islam Indonesia, menurutnya, berpartisipasi aktif dalam perumusan Pancasila. Nilai-nilai mulia Pancasila sebangun dan didukung oleh prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya beliau menegaskan bahwa:

Pancasila dan Islam dapat berjalan berdampingan dan saling menunjang satu sama lain. Keduanya tidak bertentangan dan tidak akan dipertentangkan. Tidak perlu memilih yang satu dengan mengesampingkan yang lain.

NU menerima Pancasila sebagaimana hasil rancangan konstituante tahun 1945 dan tidak menghendaki perselisihan dalam menginterpretasikan Pancasila serta menolak pandangan yang mempersamakannya dengan agama.

Islam merupakan tindakan agama, sedangkan Pancasila adalah pandangan hidupnya. Pemerintah selalu menekankan, tidak ada maksud untuk menjadikan Pancasila sebagai agama atau memperlakukan Pancasila seolah-olah agama. NU menanggapi pernyataan pemerintah itu dengan serius dan

yakin pemerintah tidak mengajak NU menerima Pancasila dengan cara mereduksi keyakinan Islam. NU menerima Pancasila bukan dalam pengertian politik, tapi lebih karena pemahaman hukum Islam.

Berkaitan dengan kembalinya NU ke *khittah* 1926 tersebut, maka keputusan KH. Achmad Shiddiq tersebut merupakan langkah terobosan yang didukung kalangan profesional untuk mengatasi kemacetan organisasi yang dialami NU. Mereka berasal dari kalangan NU yang bekerja di lapangan profesional sebagai pegawai negeri dan swasta serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Umumnya, mereka terdidik di lingkungan perguruan tinggi secara baik. Keuntungannya, mereka tidak terbias "penyakit politik", yang selama Orba sering merugikan keberadaan NU itu sendiri. Keputusan kembali ke *khittah* ini sama dengan menegaskan bahwa NU telah melepaskan ikatan afiliasinya dengan PPP. Dengan keputusan ini berarti NU telah netral, tidak terikat atau *impartial*, tidak memihak dengan organisasi politik yang ada, termasuk PPP.⁷¹

Setelah kembali ke *khittah* 1926, NU lebih bebas menentukan kiprahnya, karena sudah *kapok* terkungkung di suatu wadah PPP yang tidak banyak memberi keuntungan. Ini bukan berarti NU lepas sama sekali dari aktifitas politik, karena betapapun naluri politik NU tetap tajam dan kuat. NU masih menjadi 'pemain' politik nasional kendati berada di luar struktur, bahkan terkadang cukup jadi penonton. Justru karena itu, pemain di dalam struktur sering menggoda NU untuk diajak terjun kembali, atau minimal menjadi pendukung. Godaan inilah yang sulit dihindari dan sering mengganggu *khittah* NU.

Oleh karenanya, Muktamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya memiliki makna strategis tersendiri bagi NU, terutama berkaitan

71 Dalam konteks keluarnya NU dari PPP ini, kita bisa melihat dan sekaligus membandingkan sikap tegas NU (kaum sarungan) sewaktu keluar dari partai Masyumi pada masa rezim Orde Lama.

dengan pelaksanaan *khittah* NU 1926. Bila dalam Mukhtamar NU ke-27 di Sukorejo Situbondo, *khittah* NU 'dicanangkan', lalu dalam Mukhtamar NU ke-28 di Krapyak Yogyakarta *khittah* NU 'dimantapkan', maka pada Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya tersebut *khittah* NU 'diupayakan untuk disempurnakan'. Melihat mata rantai mukhtamar tersebut, tampaknya *khittah* NU akan tetap diagendakan sebagai pegangan strategis dan politis bagi warga NU yang terjun ke dunia politik. Persoalannya sekarang, sejauh mana *khittah* NU tersebut perlu dipertahankan, sementara tuntutan untuk kembali ke wilayah politik praktis masih menjadi obsesi banyak warga nahdliyyin terutama kiai-kiai NU? Terbukti, mereka masih terlibat dalam sejumlah manuver politik apalagi pada era reformasi sekarang ini. Pernyataan tersebut relevan dikemukakan, sebab walau sudah kembali ke *khittah* 1926, naluri politik warga NU masih sangat peka, bahkan *khittah* 1926 itu sendiri sesungguhnya juga merupakan langkah politik NU.

Memang harus diakui, sampai saat ini terjadi berbagai macam interpretasi terhadap *khittah* NU 1926. Masing-masing kelompok menginterpretasikan sesuai dengan kepentingannya hingga yang tampak kemudian adalah fragmentasi interpretasi, suatu pemahaman yang tidak utuh. Hal ini bukannya tidak baik, asal masih tetap berpijak pada semangat kebersamaan dengan konsisten pada nilai-nilai yang universal. Dengan demikian, akan terjadi dialog dan kritik wacana yang lebih memacu dinamika internal warga NU.

Mengingat sebagian besar warga *nahdliyyin* adalah rakyat desa, masyarakat bawah, dan kaum pinggiran yang sering terkena dampak langsung dari pembangunan, maka sudah selayaknya arah gerakan perilaku politik warga NU ditujukan ke sana. Dengan demikian, perjuangan NU yang strategis sesungguhnya adalah memperluas ruang publik yang lebih memungkinkan tersalurkannya aspirasi dan terwujudnya kepentingan masyarakat luas secara maksimal.

NU sebagai realitas harus dipahami dari dua sisi, yakni NU sebagai realitas sejarah yang menyangkut realitas politik, juga NU sebagai realitas kultural yang menyangkut masalah realitas massa. Bagian pertama tentang realitas sejarah, pernah melandasi tindakan NU untuk kembali ke Khittah. *Background* sejarah ini memang dilandasi oleh realitas politik saat itu (baca Andree Feillard dan Martin van Bruinessen). Realitas politik saat itu memang merugikan banyak kepentingan-kepentingan politik dan strategis NU (misalnya, penguasaan Depag, bea siswa bagi umat NU, bisnis wong NU, dan lainnya). Dan ini ditanggapi oleh kaum muda NU sebagai bentuk keprihatinan atas cita-cita pendiri NU.

Singkatnya, pilihan kembali ke Khittah adalah pilihan paling rasional strategis. Penerimaan asas Pancasila dan NKRI sebagai bentuk final negara membuahkan hasil positif yang bahkan tidak terduga. Memang pada akhirnya, NU tidak lagi berhadapan secara langsung dengan penguasa rejim militer, justru sebaliknya person-person NU-lah yang berhadapan secara frontal.

Dipandang dari sisi ini, ada keuntungan yang bisa dipetik yakni terhindarnya NU dari kobokan-kobokan yang lebih jauh oleh penguasa (bandingkan dengan PDI ketika itu yang dikobok habis-habisan oleh militer). Di sisi lain, NU justru mampu menampilkan dirinya sebagai organisasi yang relatif lebih independen dibandingkan ormas/orsospol lain ketika itu. Penolakan Gus Dur di ICMI, seakan mewakili independensi NU, yang belakangan terbukti menjadi langkah yang 'benar' bagi pengembangan budaya prularistik kaum sarungan ini. Dalam pandangan kaum militer, Gus Dur adalah personifikasi dari NU secara keseluruhan. Sebaliknya bagi kaum pluralis, tindakan Gus Dur justru terpisah dari NU --walaupun tidak bisa ditolak tindakan-tindakannya sedikit banyak mempengaruhi NU. Dalam pandangan militer, Gus Dur perlu dipinggirkan. Untuk itulah dilakukan rekayasa di Cipasung yang dimotori oleh Hartono, namun usaha tersebut

gagal. Ini kemenangan luar biasa bagi pandangan kaum prularis dan demokrat, karena membuktikan sekali lagi independensi kultural NU di hadapan penguasa militer. Setidak-tidaknya, timbul secercah harapan tentang adanya garda pembela dan penjaga demokrasi di masa mendatang. Tidak berlebihan kiranya jika harapan ini ditumpukan pada NU. Setelah Cipasung, Gus Dur justru makin lincah dan 'berani' walaupun tetap waspada dan hati-hati.

Nah, dari sini pertanyaan anda tentang potensi NU apakah harus dimanfaatkan oleh orang luar ataukah orang dalam menjadi relevan. Pertanyaan lanjutannya adalah apa dan bagaimana kepentingan NU itu? Dari sini bagian kedua pembicaraan kita justru menjadi masalah yang penting untuk dibahas untuk menentukan apa dan bagaimananya tadi, yakni realitas kultural yang menyangkut realitas massa. Kembalinya NU ke Khittah, membuat NU melebur ke dalam suatu kesatuan bangsa (*ukhuwah-wathaniyyah*) bukan kesatuan agama (*ukhuwah-islammiyah*). Peleburan ini membuatnya seakan menjadi hilang dari kancah peran roda perjalanan bangsa. Namun kalau kita amati, justru peleburan ini mendorong kemandirian masyarakat sipil. Jumlah massa yang relatif besar ini bukan main-main. Dan peleburan NU ini --walaupun belum ada studi yang mengkaji hal ini, tapi saya yakin-- mempengaruhi penguatan *civil society* bagi elemen bangsa yang lain. Kejadian-kejadian di luar negeri, seperti tumbangnya Marcos, revolusi Iran, demo mahasiswa di Korea, sedikit banyak juga membuat bangsa ini melakukan refleksi ke dalam. Refleksi ini ditambah dengan cabutnya NU dari PPP menciptakan akselerasi bagi penyadaran umat akan peran kebangsaannya yang selama ini dirampas oleh pola pembangunan satu arah rejim militer Orba.

Di sisi lain, peleburan NU ini justru menggembirakan penguasa, karena dengan demikian berkuranglah satu oposan di parlemen. Dalam jangka pendek, Khittah menguntungkan penguasa, karena akan menguatkan kembali pijakannya atas rakyat. Tapi, pada point ini, NU

pun mengalami keuntungan-keuntungan, seperti bantuan-bantuan yang mengalir ke pesantren-pesantren, dibukanya fasilitas pendidikan umum bagi lulusan pesantren, dibangunnya sarana dan prasarana, dan lainnya. Ini akan mempercepat mobilitas massa di kalangan bawah yang pada gilirannya memacu roda pertumbuhan ekonomi, dan mengangkat kalangan bawah. Ini hasil kultural, bukan politis. Perjuangan politis di parlemen justru menghasilkan sentimen negatif terhadap apa yang berbau Islam. Sebaliknya perjuangan kultural ini, walaupun terkesan merangkul penguasa, tapi NU boleh dikatakan tidak dirugikan, justru diuntungkan. Dan keuntungan ini mengalir ke massa atau umat NU tadi. Tapi coba bandingkan dengan basis-basis PPP, di Pekalongan misalnya, banyak juragan batik yang secara tradisional adalah pendukung PPP malah gulung tikar gara-gara tidak dikasih kredit oleh Bank. Karena apa?

Afiliasi politik juragan batik tadi tidak disiasati secara cerdas seperti yang telah dilakukan oleh massa NU di tempat lain, walaupun boleh dikatakan bahwa para juragan batik itu juga berafiliasi ke NU. Sebab sasaran rejim pada saat itu -- setelah NU menyatakan keluar dari politik praktis-- adalah menggembosi PPP segebos-gembosnya demi tercapainya mayoritas tunggal Golkar. Fenomena berkurangnya suara PPP di basis-basis tradisional NU menguatkan sinyalemen keberhasilan NU dalam melakukan penetrasi ke semua lini. Tidak dapat disangkal juga, bahwa upaya ini dilakukan oleh rejim militer justru untuk menciptakan ketergantungan laten NU kepada rejim Orba, walaupun tidak sepenuhnya berhasil.

Penulis justru melihat strategi kembali ke Khittah sebagai strategi brilliant Gus Dur dan komponen progresif NU yang didukung oleh para kiai sepuh. Dengan demikian tercapai dua tujuan: 1) massa NU terlindung dari represi yang semakin menjadi-jadi rejim militer, termasuk melindungi kiai-kiai yang selalu kena wajib lapor oleh aparat Kodim/Koramil setempat; 2) ada keuntungan ekonomis

bagi pemberdayaan ekonomi rakyat kecil –warga NU khususnya-- yang akan mendorong penguatan kesadaran atas hak-hak sebagai masyarakat sipil. Orang miskin secara relatif tidak bisa diharapkan meningkatkan kesadaran individunya, dan ini akan menjadi umpan empuk bagi makelar-makelar atau broker-broker politik Pemilu: bukankah *money politics* itu marak terjadi, antara lain, karena masih rendahnya kemampuan ekonomi rakyat. Di samping itu, kalau kita sungguh sedikit tentang teori Maslow bahwa orang miskin akan berkonsentrasi terhadap pemenuhan kebutuhan dasar. Tapi, orang yang secara ekonomis meningkatkan kesejahteraannya, ia akan mulai meningkatkan kesadaran eksistensi dirinya sebagai makhluk sosial: keamanan kontinuitas aliran penghasilan, keamanan menyampaikan aspirasi, yang pada ujungnya akan meningkatkan kesadaran eksistensi sebagai makhluk politik.

Rejim Soeharto membunuh kesadaran eksistensi politik tadi dengan jalan menyebarkan budaya KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). KKN akan membunuh aspirasi dari dalam diri sendiri dan dengan suburnya kultur KKN, maka kesadaran politis juga semakin tertutup, apalagi militer sudah terlibat jauh di dalamnya. Independensi kultural NU inilah yang menerbitkan secercah harapan di masa depan bagi upaya penegakan demokrasi dan pluralisme di negeri ini. Dalam jangka pendek, proses ini belum terlihat, bahkan sampai saat ini. Proses kultural memang membutuhkan waktu bergenerasi, tidak bisa membasmi budaya dalam waktu semalam.

Kembali ke pertanyaan semula, apa dan bagaimana kepentingan NU itu? Apakah kepentingan model pra-Khittah atau pasca-Khittah? Dari tinjauan dua sisi pandang tadi, secara tidak langsung saya sudah menjawab tentang sisi untung-rugi kepentingan model pra dan pasca Khittah. Keadaan untung rugi tadi harus dipahami dalam format keadaan di bawah rejim militer yang represif.

4. Politik Kaum Sarungan di Masa Orde Reformasi

Secara historis, rezim Orde Baru dinyatakan tumbang bersamaan dengan pernyataan pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden RI pada tanggal 21 Mei 1998. Oleh karena banyaknya tuntutan agar diadakan reformasi di segala bidang sebelum tumbanganya Soeharto, maka untuk membedakan dengan orde sebelumnya, orde sekarang ini lazim disebut dengan Orde Reformasi.

Menurut A. Syafi'i Ma'arif, Orde Lama dan Orde Baru memiliki keajaiban yang sama, yaitu sama-sama memuliakan dan mengagungkan Pancasila dan bahkan agama. Akan tetapi, hal tersebut hanya sebatas dalam tataran retorika. Sebab, dalam bentuk perangai dan perbuatan keduanya sama-sama melecehkan dan mengkhianati Pancasila dan agama. Di samping itu, kedua orde tersebut –disadari atau tidak– telah menciptakan suatu iklim bagi tumbuhnya budaya politik yang feodal dan otoritarian. Budaya politik ini membawa dampak negatif bagi perilaku politik bangsa, seperti tidak adanya peluang bagi masyarakat untuk menawarkan pemikiran alternatif (usul dan kritik), mampetnya saluran aspirasi, tidak berjalannya mekanisme kontrol, terjadinya pemusatan kekuasaan, berkembangnya penafsiran monolitik yang memihak penguasa, munculnya arogansi kekuasaan, egoisme politik dan semacamnya. Konsekuensi nyata dari budaya politik semacam ini adalah tumbuh subur dan melembaganya budaya NKK (Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi).

Runtuhnya rezim Orba membuka harapan baru bagi NU untuk mengkonstruksi tatanan politik baru di negara republik ini. Kabinet Reformasi Pembangunan berupaya mengakomodasi aspirasi masyarakat di era reformasi ini. Selain mengagendakan SI, Habibie ingin mempercepat Pemilu yang dijadwalkan pada bulan Juni 1999. Semangat ini melahirkan multi partai dalam Pemilu 1999 tersebut. Sebagai konsekuensinya, pada UU Politik dilakukan perubahan total.

Momentum yang demikian ini, kemudian melahirkan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang dideklarasikan oleh lima tokoh NU (KH. M. Ilyas Ruchiyat, KH. Abdurrahman Wahid, KH. A. Muhith Muzadi, KH. A. Musthofa Bisri, dan KH. M. Moenasir Ali) pada tanggal 23 Juli 1998 di Jakarta. Kelahiran PKB ini di samping merupakan anak tunggal NU, juga merupakan kendaraan politik warga *nahdliyyin*.

Namun yang terpenting, menurut penulis, sebenarnya adalah bagaimana menciptakan PKB sebagai partai yang reformatif, sehingga mampu menatap masa depan bangsa yang semakin global dan plural. Untuk menciptakan PKB yang reformatif, maka pendiriannya harus dipertimbangkan dari sudut inklusifitas dan eksklusifitas partai sebagai penampung dan penyalur kepentingan publik. Partai politik eksklusif adalah partai yang membatasi dirinya untuk berkembang karena alasan-alasan primordialisme, seperti agama, etnis, suku, atau golongan. Sedangkan partai politik inklusif adalah partai yang terbuka untuk semua kelompok masyarakat tanpa adanya diskriminasi serta alasan primordialisme. Bagi bangsa Indonesia yang memiliki pluralitas agama, etnis maupun bahasa dan sebagainya, pendirian PKB sebagai partai politik yang inklusif merupakan suatu keharusan, sebab partai yang demikian inilah yang mampu bersaing dan memiliki masa depan yang cerah dalam menghadapi perkembangan masyarakat yang semakin dinamis dan plural. Partai yang demikian itu juga selaras dengan konsep Islam yang *rahmatan li al-'alamin*.

Dari titik ini dapat dipahami, bahwa partai NU reformatif merupakan integrasi dari perilaku politik NU masa Orde Lama yang cenderung eksklusif --karena mengedepankan paradigma politik ideologis serta menggunakan atribut Islam secara transparan-- dengan perilaku politik NU Orde Baru yang cenderung lebih bersifat empiris-normatif. Karenanya, *mode of thought* untuk membangun partai NU reformatif adalah dengan menggunakan paradigma normatif-

teologis dan normatif-empiris-historis. Normatif-teologis digunakan sebagai dasar dan landasan perjuangan partai, sementara normatif-empiris-historis digunakan sebagai petunjuk operasional dalam mengejawantahkan perjuangan partai. Dalam konteks ini, diharapkan perilaku politik NU secara operasional dapat lebih menekankan internalisasi nilai-nilai etik keislaman dalam berbagai kehidupan sosial secara lebih inklusif tanpa menonjolkan atribut keislaman.

Pertama kali NU terjun pada politik praktis pada saat menyatakan memisahkan diri dengan Masyumi pada tahun 1952 dan kemudian mengikuti pemilu 1955. NU cukup berhasil dengan meraih 45 kursi DPR dan 91 kursi Konstituante. Pada masa Demokrasi Terpimpin, NU dikenal sebagai partai yang mendukung Sukarno. Setelah PKI memberontak, NU tampil sebagai salah satu golongan yang aktif menekan PKI, terutama lewat sayap pemudanya GP Ansor. NU kemudian menggabungkan diri dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada tanggal 5 Januari 1973 atas desakan penguasa Orde Baru. Mengikuti pemilu 1977 dan 1982 bersama PPP. Pada saat muktamar NU 1984 di Situbondo, NU menyatakan diri untuk 'Kembali ke Khittah 1926' yaitu untuk tidak berpolitik praktis lagi. Namun setelah reformasi 1998, muncul partai-partai yang mengatasnamakan NU. Yang terpenting adalah Partai Kebangkitan Bangsa yang dideklarasikan oleh KH. Abdurrahman Wahid. Pada pemilu 1999 PKB memperoleh 51 kursi DPR dan bahkan bisa mengantarkan Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI. Pada pemilu 2004, PKB memperoleh 52 kursi DPR.

Gagasan kembali ke khittah pada tahun 1984, merupakan momentum penting untuk menafsirkan kembali ajaran ahlussunnah wal jamaah, serta merumuskan kembali metode berpikir, baik dalam bidang fikih maupun sosial. Serta merumuskan kembali hubungan NU dengan negara (baca: politik). Gerakan tersebut berhasil kembali membangkitkan gairah pemikiran dan dinamika sosial dalam tubuh NU.

Jumlah warga NU yang merupakan basis pendukungnya diperkirakan mencapai lebih dari 80 juta orang, yang mayoritas di pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatra dengan beragam profesi, yang sebagian besar dari mereka adalah rakyat jelata, baik di kota maupun di desa. Mereka memiliki kohesifitas yang tinggi karena secara sosial ekonomi memiliki problem yang sama, selain itu mereka juga sangat menjiwai ajaran ahlusunnah wal jamaah. Pada umumnya mereka memiliki ikatan cukup kuat dengan dunia pesantren yang merupakan pusat pendidikan rakyat dan cagar budaya NU.

Basis pendukung NU ini mengalami pergeseran, sejalan dengan pembangunan dan perkembangan industrialisasi, maka penduduk NU di desa banyak yang bermigrasi ke kota memasuki sektor industri. Kalau selama ini basis NU lebih kuat di sektor petani di pedesaan, maka di sektor buruh di perkotaan, juga cukup dominan. Demikian juga dengan terbukanya sistem pendidikan, basis intelektual dalam Nu juga semakin meluas, sejalan dengan cepatnya mobilitas sosial yang terjadi selama ini.[]